MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Jalan Jenderal A. Yani Kav.58 (Lt. 9 – 10) By Pass Jakarta 10510 PO BOX 1148
Telepon: (021) 29079177 (Hunting) Fax (021) 3505193
Laman: *https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id*

SURAT TUGAS
Nomor : 183 /DjMT/Ratgas/KP.01.3/VII/2023

Menimbang : Dalam rangka Supervisi Peningkatan Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran dan verifikasi Kelengkapan Data Pendukung dalam Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2023.

Dasar :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-5/PB/2022 tentan Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Memberi Tugas

Kepada : Daftar Nama Terlampir

Untuk :
1. Melaksanakan tugas untuk Supervisi Peningkatan Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran dan verifikasi Kelengkapan Data Pendukung dalam Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2023 yang bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 5 sd. 7 Juli 2023;
2. Segala biaya dibebankan pada DIPA Ditjen Badilmiltun Nomor SP DIPA-005.05.1.663122/2023 Tahun Anggaran 2023 Tanggal 30 November 2022;
3. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2023

Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara,

Ach. Jufri

Lampiran Surat Tugas Dirjen Badilmiltun MA-RI
Nomor : 183 /DjMT/Ratgas/KP.01.3/VII/2023
Tanggal : 4 Juli 2023

NO	NAMA	NIP/NRP	JABATAN
1.	Teguh Ahmadi, S.E., M.M.	198406262009041007	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Ditjen Badilmiltun
2.	Victor Albadiu Ratib, S.H.	199611022019031005	Penyusun Laporan Keuangan
3.	Hilda Riandini, S.Kom.	199001172015032003	Analis Pelaksanaan Anggaran Ditjen Badilmiltun
4.	Rahmawati Sukma Wardani, A.Md.Kb.N.	200003062022012004	Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil
5.	Nadia Sifa Auliya, S.Kom.	-	PPNPN

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara,

Ach. Jufri